



# Alokasikan Rp 100 M untuk Transportasi Publik

## Dishub Berencana Tambah 17 Unit Feeder

**SURABAYA** - Komisi C DPRD Surabaya sepakat untuk menaikkan anggaran pengembangan transportasi publik pada APBD 2024. Dalam rapat kemarin (25/10), dewan setuju untuk menambah anggaran menjadi Rp 100 miliar. Naik Rp 28 miliar dari rencana awal Rp 72 miliar. Anggaran Rp 100 miliar itu setara 1 persen dari kekuatan APBD 2024 sebesar Rp 10,882 triliun. Sebelumnya hanya 0,6 persen. "Dengan menambah anggaran ini, kami

harap transportasi publik terus berbenah," kata Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati. Menurut Aning, anggaran itu bisa digunakan untuk penambahan armada transportasi publik yang sudah sangat urgen. Sebab, animo warga untuk naik kendaraan umum mulai terasa. Khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja. "Ini harus di-support dengan menambah armada," ujar Aning. Anggota Komisi C William Wira-kusuma menyatakan, penambahan jenis transportasi publik harus memperhatikan jalur-jalur yang sibuk dan padat penumpang. Jalur

selatan-utara, contohnya, dibutuhkan penambahan Suroboyo Bus. Kepadatan penumpang terlihat dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Rajawali. Sementara itu, jalur yang menghubungkan wilayah Benowo sampai kawasan Jalan Tunjungan dibutuhkan tambahan *feeder*. Pengguna *feeder* mulai antre di jalur tersebut. "Ini agar penumpang tidak antre lama. Kalau antrean saja lama, warga akan kembali menggunakan kendaraan pribadi lagi," ujarnya. Selain penambahan armada, dewan mendorong dishub untuk menambah rute. William menilai, angkutan *feeder* perlu membuka rute baru

yang belum banyak terlayani kendaraan umum. "Apalagi, tema APBD tahun depan juga mencakup pengembangan transportasi terpadu dan berkelanjutan," katanya. Kadishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru setuju dengan opsi penambahan armada. Dia menyampaikannya, pihaknya sudah berencana menambah 17 unit *feeder* tahun depan. Selain itu, pihaknya mengkaji untuk menambah armada Suroboyo Bus. Opsinya, menggandeng pihak ketiga melalui sistem *buy the service* (BTS). "Artinya, kita tidak membeli armada, tapi membayar per kilometer ke rekanan," papar Tundjung. (mar/c12/jun)